KEEFEKTIFAN KEBIJAKAN FISKAL BERUPA INSENTIF PAJAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

Disusun oleh :

Adinda Alfi Syahrin. E (220321100033 / kelas A)

220321100033@student. trunojoyo. ac. id

Agribisnis, Fakultas Petanian, Universitas Trunojoyo Madura

I. PENDAHULUAN

1. 1 Latar belakang

Pandemi covid-19 merupakan kondisi dimana penyebaran wabah yang sedang melanda dikawasan yang luas bahkan sampai seluruh dunia. Virus covid-19 muncul pertama kali di negara China pada akhir tahun 2019. Kasus covid pertama di Indonesia diumumkan pada bulan maret 2020 (Silalahi and Ginting, 2020). Sejak wabah covid-19 melanda Indoensia, banyak sekali perubahan dan dampak yang timbul dalam tatanan kemasyarakatan negara Indonesia.

Pandemi covid-19 tidak hanya menyebar di Indonesia saja, tetapi juga melanda diseluruh dunia menimbulkan berbagai dampak yang merugikan dalam berbagai bidang (Kartiko, 2020). Situasi dalam masa pandemi covid-19 mengakibatkan pengaruh terbesar dunia kesehatan dan perekonomian yang dialami oleh negara Indonesia. Banyak kebijakan dan peraturan baru yang ditetapkan untuk bisa memperlambat penularan dan penyebaran virus covid-19 ini.

Kebijakan pemerintah dalam menurunkan kasus covid-19 salah satunya dengan cara menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau biasanya disebut dengan PSBB (Fahrika and Roy, 2020). Pembatasan ini dapat meningkatkan kembali tingkat kesehatan masyarakat, tetapi dengan adanya PSBB sektor ekonomi di Indonesia semakin menurun karena kurangnya minat masyarakat dalam membeli barang atau produk. Pemerintah juga mengusahakan agar kedua sektor atau bidang tersebut dapat sejalan, dengan kata lain meningkatkan kesehatan dan perekonomian di negara Indonesia (Heliany, 2021).

Pemerintah Indoensia menetapkan berbagai macam kebijakan untuk bisa membangkitkan perekonomian Indononesia salah satunya dengan adanya kebijakan fiskal (Mirani *et al.*, 2021). Pemerintah yang berwenang dalam mengubah besaran jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh yang berkewajiban dalam membayarkan pajak. Menurut (Lativa, 2021) kebijakan fiskal sangat berdampak pada distribusi nasional, investasi nasional, dan pendapatan nasional. Dari adanya kebijakan perubahan pajak tersebut pemerintah berharap bisa meningkatkan kembali sektor perekonomian di Indonesia.

1. 2 Rumusan masalah

Rumusan masalahnya yaitu penurunan perekonomian di Indonesia yang timbul akibat adanya covid-19 yang melanda di Indonesia. Peran dan kefektifan pemerintah dalam menangani masalah tersebut dengan adanya perubahan nilai pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat yang berkewajiban.

1. 3 Tujuan

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui peran perubahan pajak pada kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk bisa membangkitkan kembali sektor perekonomian. Selain itu juga untuk mengetahui kefektifan upaya pemerintah yang sudah di tetapkan dari kebijaka fiskal dalam menangani masalah pada perekonomian yang ada di Indonesia pada masa pandemi covid -19.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Teori kebijakan fiskal pernah dikemukakan oleh Keynes sekitar tahun 1930-an. Menurut (Hertinawati, 2021) Keynes mengemukakan bahwa perekonomian akan tetap full employment dengan arti bahwa situasi perekonomian nasional, hampir semua orang mampu dan mau menjadi tenaga kerja dengan upah yang sudah berlaku dan kondisi mampu untuk melakukannya. Teori Keynes ini menjadi landasan adanya kebijakan fiskal, kebijakan ini dibuat sebagai bentuk reaksi perkembangan besar pada perekonomian di Amerika pada saat itu.

Sistematika pada pasar bebas tidak bisa secara langsung dapat menyesuaikan pekerjaan secara penuh juga pernah disampaikan oleh Keynes. Hal itu karena selalu ada campur tangan pemerintah dari adanya kebijakan government (Wijayanti and Ngadiman, 2020). Kebijakan ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

Konsep pemikiran dari kebijakan fiskal yang memiliki tujuan untuk menstabilkan antara jumlah dari uang yang beredar dengan ekonomi tingkat bunga (Indahsari and Fitriandi, 2021). Kebijakan pemerintah dalam megarahkan perekonomian dalam negara dari adanya pendapatan pajak dan pengeluaran belanja di negara tersebut. Menurut (Hertinawati, 2021) kebijakan fiskal merupakan bentuk adanya kebijakan untuk bisa meraih keseimmbangan dan kestabilan dalam perekonomian dan laju pembangunan. Penyesuaian pendapatan dan pengekuaran pemerintah sudah ditetapkan pada APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara.

Variabel pembahsan ada dua indikator yang akan dibahas yaitu kebijakan fiskal dan pajak yang terjadi pada masa pandemi covid-19 di Indonesia. Menurut (Feranika and Haryati, 2020) kebijakan fiskal merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menciptakan perubahan sistem pajak atau sistem pengeluaran belanja negara dengan tujuan dapat mengatasi permasalahan perekonomian yang sedang terjadi. Kebijakan fiskal ini bagian dari teori Keynes yaitu perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh naik turunnya pendapatan dan pengeluaran belanja nasional (Siri, Hasniaty and Mariana, 2022).

Pajak merupakan kas wajib yang harus dibayarkan ke negara oleh individu atau lembaga. Pajak memiliki sifat memaksa yang sudah diatur dalam undang-undang. Menurut (Aqmarina and Furqon, 2020) pajak digunakan untuk keperluan dan kebutuhan negara untuk kemakmuran rakyatnya. Dalam masa pandemi covid-19 pemerintah Indonesia mencoba utnuk mengurangi nilai besaran pajak yang akan ditangguhkan oleh rakyatnya. Pemrintah berharap dari adanya penurunan pajak ini dapat meningkatkan kembali perekonomian negara Indonesia (Adiyanta, 2020).

Hasil penelitian terdahulu menurut (Siregar, 2021) covid-19 yang melanda Indonesia sangat berdampak

pada arus kas negara. Pemerintah menetapkan kebijakan yang bertujuan untuk memancing situasi menstabilkan kembali sektor yang terdampak oleh adanya pandemi covid-19. Pemerintah berencanaa untuk menetapkan pembayaran wajib pajak untuk bisa menopang kembali perekonomian nasional.

Hasil penelitian terdahulu menurut (Rachmawati and Ramayanti, 2016) kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai perpajakan (sanksi pajak, insentif pajak, dan penurunan besaran pajak) dapat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Pelaku usaha UMKM berpengaruh besar dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kepatuhan pembayaran wajib pajak pelaku usaha UMKM seharusnya bisa mengoptimalkan pendapatan negara dalam sektor perpajakan.

III. PENDEKATAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dari analisis beberapa data sekunder. Kualitatif deskriptif merujuk pada jawaban dari pertanyaan peneliti berkaitan tentang siapa, apa, mengapa, bagaimana, dan kapan (Yuliani, 2018). Metode penelitian yang dikenal dengan analisis data sekunder menggunakan data sekunder sebagai data primer (Hanifa, Wajuba and Fisabilillah, 2021). Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, menafsirkan, menyajikan dan menganalisis situasi saat ini, atau dengan kata lain, bertujuan untuk mempelajari tentang kondisi saat ini dan kemudian melihat bagaimana hubungannya dengan variabel lain (Moen and Middlethon, 2015). Pada artikel ini tidak menggunakan hipotesis atau penafsiran tetapi menggunakan gambaran fakta-fakta yang ada dengan adanya faktor pengujian yang ada pada data yang diacu.

IV. PEMBAHASAN

Kebijakan fiskal merupakan salah satu usaha pemerintah dalam membangkitkan kembali perekonomian yang menurun akibat adanya pendemi covid-19 yang dihadapi oleh Indonesia (Rusdiyantoro and Simanjuntak, 2022). Kebijakan fiskal yang diusahakan yaitu melalui pendapatan nasional dari adanya pajak. Kebijakan untuk menginsentifkan kembali pajak untuk yang berkewajiban membayarkan pajak. Dengan adanya insentif pajak ini harapan pemerintah dalam meningktakan kembali perekonomian Indonesia dapat terwujudkan.

Menurut (Kartiko, 2020) insentif fiskal itu sendiri dapat berupa pembebasan pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pengurangan biaya untuk pengeluaran tertentu, pengurangan tarif impor, atau penurunan tarif bea dan cukai. Yang dimaksud dengan "insentif perpajakan" dapat dipahami sebagai perakturan khusus dalam perundang-undangan perpajakan yang pada umumnya dapat menurunkan besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Pengaturan ini diberikan oleh negara untuk membantu perekonomian bangsa.

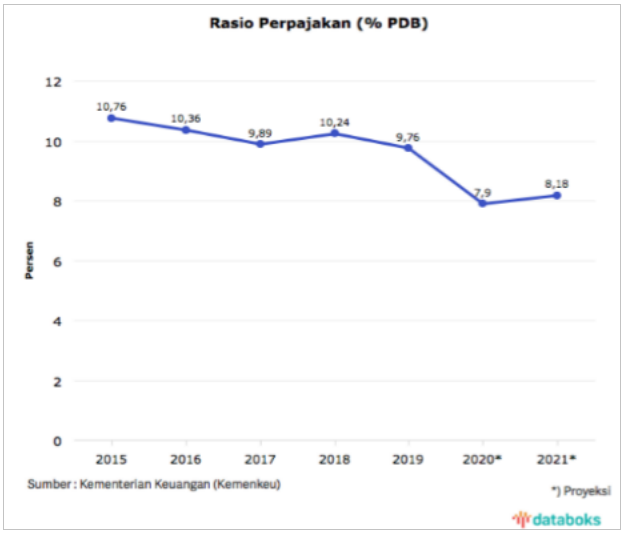

Gambar 1. Rasio perpajakan (Subagiyo *et al.*, 2021)

Dari grafik diatas adanya penurunan perpajakan pada masa pandemi covid-19. Hasil perpajakan ini hanya mampu mencapai sekitar 89% senilai Rp 1.070 triluin dari target yang akan dicapai (Subagiyo *et al.*, 2021). Indonesia sebagai negara yang sudah menetapkan berbagai kebijakan dalam pelonggaran perpajakan bagi wajib pajak sebagai respon melemahnya perekonomian. Tujuan utama dari adanya kelonggaran atau pengurangan besaran pajak yaitu, 1) memudahkan administrasi pajak, 2) mempertahankan daya beli masyarakat, 3) menyamakan biaya perubahan, 4) mendukung bidang kesehatan, dan 5) membentuk margin bagi arus kas perusahaan.

Dalam jurnal (Marlina and Syahribulan, 2021) pemerintah telah mengumumkan adanya program untuk memulihkan kembali perekonomian Indonesia yang dinamai dengan PEN (program pemulihan ekonomi nasional). Program ini salah satu upaya untuk menjaga dan meningkatkan perekonomian pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dimasa panemi covid-19. PEN ini memiliki program seperti, 1) insentif pajak, 2) subsidi bunga bagi UMKM, 3) anggaran belanja penanganan covid 19, 4) modal koprasi, 5) membantu sektoral dan pemda dengan program padat karya, 6) bansos bagi masyarakat berpengahsilan rendah.

Gambar 2. PPh UMKM ditangguh pemerintah (Marlina and Syahribulan, 2021)

Situasi yang berat dalam masa pandemi covid-19 pemerintah juga menetapkan kebijakan insentif pajak bebas PPh (pajak penghasilan) dalam peraturan mentri keuangan Nomor 44/PMK. 03/2020 mengenai kebijakan insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak covid-19. Pemerintah juga berupaya suapaya UMKM dapat mengerti fungsi dan manfaat adanya insentif pajak dengan melakukan kolaborasi serta koordinasi sosialisasi. Tujuan akhirnya dapat mendorong kembali perekonomian pada masa pandemi covid-19 serta dapat membantu para UMKM dalam mendorong kembali usaha mereka. Dirjen pajak akan selalu melakukan hasil dari relaksasi dan insentif pajak dengan pemberian kebijakan insentif pajak bagi UMKM untuk bisa lebih leluasa dalam menggerakkan usahanya.

UMKM menjadi peran penting dalam menggerakkan perekonomian, pembangunan, ketenaga kerjaan. Tetapi asih banyak pelaku usaha UMKM yang belum mengetahui adanya pemanfaatan insentif pajak yang dapat meringankan beban mereka dalam masa pandemi covid-19 (Agustina, Rahman and Filianti, 2021). Hal ini perlu adanya sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah yang terkait dalam menyadarkan masyarakat dan pelaku usaha agar dapat mendorong kesadaran wajib pajak dan pemanfaatan insentif pajak.

Adanya insentif pajak pelaku usaha UMKM bisa lebih hemat dalam memenuhi biaya pajak, sehingga dapat melaksanakan aktivitas usahanya lebih leluasa. Dalam kata lain insentif pajak ini dapat meringankan beban pelaku usaha UMKM dalam pemenuhuan biaya pajak. Meningkatmya kepatuhan UMKM dalam pembayaran pajak disebabkan oleh pemanfaatan insentif pajak yang semakin meningkat (Andreansyah and Farina, 2022). Peningkatan kepatuhan membayar pajak ini juga harus didampingi oleh adanya sanksi pajak yang samakin ketat dan tegas (Lita Novia Yulianti, 2022).

Dalam jurnal (Ulumiyah, 2020) dampak dari covid-19 cukup berat dalam perekonomian. Dampak ini sebagian besar dari penerimaan pajak perdagangan. Hasil penerimaan pajak perdagangan ini berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Penerimaan pajak menurun akibat dari menurunnya produktivitas di China sehingga distribusi bahan baku dan barang lainnya mengalami hambatan. Menurunnya penerimaan pajak juga disebabkan adanya dukungan kebijakan insentif pajak. Penerimaan pajak ditahun 2020 berkembang sebesar sekitar 14, 7% angka tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya yang berkembang sebesar sekitar 39, 8%.

Dari tiga jurnal yang dijabarkan dalam pembahasan ini memiliki kesamaan dalam kebijakan pemerintah untuk bisa membangkitkan kebali perekonomian di Indonesia dengan cara insentif pajak atau pengurangan besaran nilai pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Tetapi dalam jurnal (Ulumiyah, 2020) menjelaskan bahwa insentif pajak juga masih belum bisa melebihi pertumbuhan restitusi pajak ditahun 2019. Kebijakan fiskal berupa insentif pajak cukup efektif untuk mendorong kembali perekonomian, tetapi masih perlu adanya kebijakan lainnya untuk bisa memaksimalkan kembali perkembangan ekonomi di Indonesia agar bisa lebih berkembang dari tahun sebelumnya. Insentif pajak dapat membuat masyarakat atau pelaku usaha bisa patuh melakukan pembayaran dan pelaporan pajak kepada negara, hal ini dapat menggerakkan kembali perekonomian di Indonesia dalam sektor perpajakan. Covid-19 memang membawa dampak yang sangat besar bagi perekonomian di Indonesia, pemerintah juga mengusahakan agar terus meningkatkan kembali ekonomi di Indonesia dengan adanya kebijakan insentif pajak walaupun kebijakan tersebut masih membutuhkan waktu yang lama untuk bisa mengembalikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019.

V. KESIMPULAN

Pandemi covid-19 merupakan kondisi dimana penyebaran wabah virus corona yang sedang melanda dikawasan yang luas bahkan sampai seluruh dunia termasuk negara Indonesia. Kondisi dalam masa pandemi covid-19 mengakibatkan pengaruh terbesar dunia kesehatan dan perekonomian yang dialami oleh negara Indonesia. Pemerintah Indoensia menetapkan berbagai macam kebijakan untuk bisa membangkitkan perekonomian Indononesia salah satunya dengan adanya kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini salah satunya dalam bentuk pengurangan besaran pajak atau insentif pajak. Dari adanya kebijakan perubahan pajak tersebut pemerintah berharap bisa meningkatkan kembali sektor perekonomian di Indonesia. Dengan adanya insentif pajak ini dapat mengubah dan mendorong para pelaku UMKM untuk membayar pajak dan melaporkan usaha mereka kepada negara. UMKM di Indonesia menjadi sektor penting dalam membantu membangkitkan perekonomian di Indonesia memalui pembayaran pajak. Covid-19 memang membawa dampak yang sangat besar bagi perekonomian di Indonesia, pemerintah juga mengusahakan agar terus meningkatkan kembali ekonomi di Indonesia dengan adanya kebijakan insentif pajak walaupun kebijakan tersebut masih membutuhkan waktu yang lama untuk bisa mengembalikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019. Kebijakan fiskal berupa insentif pajak cukup efektif untuk mendorong kembali perekonomian, tetapi masih perlu adanya kebijakan lainnya untuk bisa memaksimalkan kembali perkembangan ekonomi di Indonesia agar bisa lebih berkembang dari tahun sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adiyanta, F. S. (2020) 'Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijaksanaan Fiskal untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19', *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), pp. 162–181. Available at: https://doi. org/10. 14710/alj. v3i1. 162-181.

Agustina, Y., Rahman, A. and Filianti, F. (2021) 'Insentif Pajak: Solusi Tepat bagi UMKM di Masa Pandemi Covid-19', *Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), pp. 149–155. Available at: https://doi. org/10. 30656/jpmwp. v5i2. 2618.

Andreansyah, F. and Farina, K. (2022) 'Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM', *Jesya*, 5(2), pp. 2097–2104. Available at: https://doi. org/10. 36778/jesya. v5i2. 796.

Aqmarina, F. and Furqon, I. K. (2020) 'Peran Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19', *Finansia: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, 03(02), pp. 256–274. Available at: www. febi. metrouniv. ac. id;

Fahrika, A. I. and Roy, J. (2020) 'Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Perkembangan Makro Ekonomi Di Indonesia Dan Respon Kebijakan Yang Ditempuh', *Inovasi*, 16(2), pp. 206–213.

Feranika, A. and Haryati, D. (2020) 'Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid 19', *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, 2(3), pp. 146–152. Available at: https://doi. org/10. 35899/biej. v2i3. 154.

Hanifa, N., Wajuba, L. and Fisabilillah, P. (2021) 'Peran Dan Kebijakan Pemerintahan Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(July), pp. 9–19.

Heliany, I. (2021) 'Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Resesi Ekonomi di Indonesia', *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, 8(1), pp. 15–21.

Hertinawati, H. (2021) 'Analisa terhadap Kebijakan Fiskal dan Moneter Indonesia dalam Menghadapi Wabah Pandemi Covid-19', *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi)*, 4(2), p. 118. Available at: https://doi. org/10. 32493/skt. v4i2. 8936.

Indahsari, D. N. and Fitriandi, P. (2021) 'Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan Ppn', *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), pp. 24–36. Available at: https://doi. org/10. 31092/jpkn. v3i1. 1202.

Kartiko, N. D. (2020) 'Insentif Pajak Dalam Merespons Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Pariwisata', *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), pp. 124–137. Available at: https://doi. org/10. 31092/jpkn. v2i1. 1008.

Lativa, S. (2021) 'Analisis Kebijakan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19 dalam Meningkatkan Perekonomian', *Jurnal Ekonomi*, 2021(3), p. 15.

Lita Novia Yulianti (2022) 'Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19', *Manajemen*, 2(1), pp. 46–53. Available at: https://doi. org/10. 51903/manajemen. v2i1. 127.

Marlina, L. and Syahribulan, S. (2021) 'Peranan Insentif Pajak Yang Di Tanggung Pemerintah (DTP) Di Era Pandemi Covid 19', *Economy Deposit Journal (E-DJ)*, 2(2), pp. 58–66. Available at: https://doi. org/10. 36090/e-dj. v2i2. 910.

Mirani, K. P. *et al.* (2021) 'Strategi Kebijkan Fiskal Pemerintahan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19', *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), pp. 193–204. Available at: http://www. ejournal. pelitaindonesia. ac. id/ojs32/index. php/BILANCIA/index.

Moen, K., & Middelthon, A. L. (2015). Qualitative Research Methods. In Research in Medical and Biological Sciences: From Planning and Preparation to Grant Application and Publication. https://doi.org/10.1016/B978-0-12- 799943-2.00010-

Rachmawati, N. A. and Ramayanti, R. (2016) 'Manfaat pemberian insentif pajak penghasilan dalam kepatuhan wajib pajak UMKM', *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 4(2), pp. 176–185.

Rusdiyantoro, I. and Simanjuntak, R. A. (2022) 'Kesinambungan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), pp. 20–29. Available at: https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1706.

Silalahi, D. E. and Ginting, R. R. (2020) 'Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19', *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), pp. 156–167.

Siregar, N. Y. (2021) 'Dampak Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak Negara Pada Sektor Umkm Di Indonesia', *Jurnal STIE Ibmi Medan*, 51(51), pp. 1–7. Available at: https://stieibmi.ac.id/ojs/ojsibmi/index.php/JIBMI/article/view/116.

Siri, R., Hasniaty, H. and Mariana, L. (2022) 'Strategi Kebijakan Fiskal Menangani Dampak Pandemi COVID-19', *Ekonomika*, 6(1), pp. 96–109.

Subagiyo, A. *et al.* (2021) 'Strategi Kebijakan Fiskal Dalam Menghadapi Resesi Ekonomi melalui Kebijakan Pajak', *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 8(2), pp. 189–194.

Ulumiyah, K. (2020) 'Dampak Covid-19 Terhadap Sektor Ekonomi Dan Sektor Pajak Indonesia', *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana*, 1, pp. 1–5.

Wijayanti, A. and Ngadiman (2020) 'Peran Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Resesi Ekonomi Akibat Dampak Pandemi Covid-19', *Jurnal Kontemporer Akuntansi*, 3(1), pp. 1–10. Available at: http://repository.untar.ac.id/36276/%0Ahttp://repository.untar.ac.id/36276/2/AngelineWijayanti127182006BAB I-BAB III.pdf.

Yuliani, W. (2018) 'Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling', *Jurnal Quanta*, 2(2), pp. 83–91. Available at: https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497.